

Analisis Tindak Penyimpangan Kasus Korupsi Surya Darmadi dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan

Syifa'a Angelica Putri Winugra; Anastasya Christi Mukuan; Salsabila Nurhaliza; Vanesa Lin; Raditya Raihan Wijaya; Christian Allen Gunawan. Universitas Pradita, syifaa.angelica@student.pradita.ac.id

***ABSTRACT:** Corruption is one of the serious issues that often occur in developing countries, such as Indonesia. Many efforts have been made to eradicate corruption in Indonesia; however, corruption remains rampant in various forms. One example is the corruption case involving Surya Darmadi, which pertains to the misuse of permits in the palm oil plantation sector. This study aims to analyze the misconduct in Surya Darmadi's corruption case from the perspective of human values and to examine the measures taken by the Corruption Eradication Commission (KPK) to address the case. The research method used is qualitative research. The findings are as follows: First, in Surya Darmadi's corruption case, the resolution of site and plantation permits was carried out illegally without proper approval for obtaining forest area release permits. Second, KPK's actions in handling the Surya Darmadi case align with human values. Third, several factors contributing to corruption in Surya Darmadi's case, despite violating human values, include human greed, a consumptive lifestyle, and weak morality.*

***KEYWORDS:** corruption, humanitarian values, surya darmadi .*

ABSTRAK: Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang seringkali terjadi di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia. Banyak upaya dilakukan untuk pemberantas korupsi di Indonesia, namun hingga saat ini korupsi masih merajalela dalam berbagai bentuk, salah satunya kasus korupsi Surya Darmadi penyalahgunaan perizinan di sektor perkebunan sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah: menganalisis tindak penyimpangan kasus korupsi Surya Darmadi dalam perspektif nilai kemanusiaan dan upaya apa saja yang dilakukan KPK dalam menangani kasus korupsi Surya Darmadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yaitu: Pertama, berdasarkan kasus korupsi Surya Darmadi kasus tersebut penyelesaian izin tapak dan perkebunan yang dilakukan secara tidak sah tanpa adanya dasar persetujuan dalam memperoleh izin pelepasan kawasan hutan. Kedua, tindak KPK menangani kasus Surya Darmadi sesuai nilai kemanusiaan. Ketiga, beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi pada kasus Surya Darmadi meskipun melanggar nilai kemanusiaan adalah sifat serakah pada manusia, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah.

KATA KUNCI: korupsi, nilai kemanusiaan, surya darmadi

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan yang terus menjadi tantangan utama di Indonesia. Tindakan korupsi termasuk dalam kategori penyakit sosial yang sejajar dengan kejahatan lain seperti suap, penggelapan dana, pemalsuan dokumen, perusakan barang bukti, kecurangan, dan pemerasan. Korupsi terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah, menunjukkan betapa luas dan sistemiknya permasalahan ini. Transparency International (TI) dalam laporan tahun 2015 mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-88 dari 188 negara dalam indeks persepsi korupsi, menandakan bahwa korupsi masih menjadi masalah signifikan di negara ini (Nurwardani et al., 2016, hlm. 15).

Korupsi dan Sektor Sumber Daya Alam

Sebagai negara dengan kawasan hutan terluas di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola hutan sebagai aset negara untuk mencapai kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Namun, buruknya tata kelola hutan, termasuk ketidakpastian hukum dan tumpang tindih perizinan, menjadi celah bagi praktik korupsi di sektor sumber daya alam, yang merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup (Sejati & Prasetyo, 2023, hlm. 57).

Korupsi di sektor ini sering muncul dalam bentuk penyalahgunaan alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan dengan sengaja untuk mengubah kawasan hutan menjadi lahan perkebunan yang memberikan keuntungan ekonomi bagi individu atau kelompok tertentu. Mispansyah dan Nurunnisa (2021) menjelaskan, "Praktik korupsi di sektor perizinan perkebunan sawit umumnya dilakukan melalui suap, baik dalam proses penerbitan izin maupun berdasarkan luas lahan yang dimintakan izin."

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi didorong oleh berbagai faktor, baik individu maupun struktural. Pusat Edukasi Anti-Korupsi (2022) mencatat beberapa faktor internal, seperti sifat serakah, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya moralitas. Kesenakahan membuat seseorang tidak pernah merasa cukup, sementara gaya hidup konsumtif mendorong pengeluaran melebihi pendapatan. Moral yang lemah, seperti kurangnya kejujuran dan rendahnya rasa malu, menjadi penyebab seseorang mudah tergoda untuk melakukan korupsi.

Hartanti dalam Aisyah (2011) menyebutkan, "Lemahnya pendidikan agama, ketidaktegasan hukum, serta kemiskinan menjadi faktor utama yang memungkinkan korupsi terus berkembang." Selain itu, lemahnya penegakan hukum memperparah situasi ini, memberikan ruang bagi para pelaku korupsi untuk terus beroperasi tanpa takut terhadap sanksi.

Studi Kasus: Surya Darmadi dan PT Duta Palma

Kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi menjadi salah satu contoh besar dampak korupsi di sektor sumber daya alam. Dalam kasus ini, Surya Darmadi, melalui PT Duta Palma Group, diduga menyerobot lahan seluas 37.095 hektar tanpa izin, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp78 triliun (Puspadini, 2023). Hakim menyatakan, "Terdakwa Surya Darmadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam dakwaan primer." (Ernes, 2023).

Surya Darmadi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar. Meski demikian, Surya terus menyangkal tuduhan tersebut, menyatakan, "Saya tidak pernah berpikir untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Semua utang saya lunasi." (Puspadini, 2023).

Implikasi dan Solusi

Dampak korupsi di sektor sumber daya alam sangat luas, mencakup kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial, dan hilangnya

pendapatan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas, investigasi menyeluruh, serta reformasi di sektor perkebunan menjadi langkah penting untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam proses perizinan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, "Pendidikan antikorupsi harus diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan untuk membangun kesadaran dan budaya antikorupsi di masyarakat." Langkah ini menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang lebih sadar dan berintegritas, sekaligus mencegah terulangnya kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Korupsi di Indonesia, terutama di sektor sumber daya alam, membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, reformasi kelembagaan, dan edukasi masyarakat. Dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," bangsa Indonesia dapat membangun sistem yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis sumber-sumber data sekunder yang berkaitan dengan kasus korupsi Surya Darmadi dan perspektif nilai kemanusiaan. Penelitian ini difokuskan pada tinjauan literatur hukum, peraturan, laporan, serta sumber ilmiah yang relevan dengan topik. Populasi penelitian terdiri dari, undang-undang terkait tindak pidana korupsi, laporan investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), putusan pengadilan dalam kasus Surya Darmadi, serta artikel dan publikasi ilmiah yang membahas nilai-nilai kemanusiaan dalam penanganan korupsi. Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrument pengumpulan data pada jurnal ini dilakukan melalui penelaahan

dokumen, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis sumber-sumber yang relevan. Penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis kasus korupsi Surya Darmadi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sudah tepat. Penelitian ini bersifat perskriptif, yaitu menganalisis lebih mendalam mengenai tindak kasus korupsi Surya Darmadi dalam perspektif nilai kemanusiaan dan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sudah tepat.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Latar Belakang Kasus

Kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group berawal dari pemberian izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) oleh Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Lachman, kepada empat perusahaan di bawah grup tersebut: PT Banyu Bening Urama (2003), PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, dan PT Seberida Subur (2007). Izin tersebut mencakup kawasan Hutan Produksi yang Dikonversi (HPK), Hutan Penggunaan Lainnya (HPL), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Namun, proses perizinan dilakukan secara tidak sah tanpa persetujuan pelepasan kawasan hutan. Hingga saat ini, PT Duta Palma Group belum memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) yang sah, dan tidak memenuhi kewajiban hukum untuk mengalokasikan 20% lahan bagi pola kemitraan dengan masyarakat (Putri, 2024).

Peran Surya Darmadi

Pada 1 Agustus 2022, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group, sebagai tersangka atas dugaan korupsi berupa perampasan lahan seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Selama periode 2003–2022, lahan tersebut dikelola tanpa izin, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 78 triliun.

Sebelumnya, pada 2014, Surya Darmadi juga terlibat dalam kasus korupsi alih fungsi hutan di Riau, memberikan suap sebesar Rp 3 miliar kepada Gubernur Riau Annas Mamun melalui perantara. Dalam kasus ini, Surya dijerat pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (Putri, 2024).

Analisis Penyebab Korupsi

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi yang terjadi di Indonesia sering kali dipicu oleh faktor internal seperti keserakahan, rendahnya moralitas, dan lemahnya etika pelayanan publik (Yamin, 2016 dalam Syarief & Prastiyo, 2018). Dalam konteks kasus Surya Darmadi, faktor keserakahan menjadi pendorong utama tindakan korupsi yang dilakukan, termasuk pembayaran kepada pejabat daerah untuk memuluskan perizinan yang tidak sah (Nailuvar et al., 2023, hlm. 143).

Perspektif Nilai Kemanusiaan

Korupsi seperti yang dilakukan oleh Surya Darmadi merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terutama sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Nilai ini menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia, yang diabaikan dalam tindakan korupsi ini.

Firman Freaddy Busroh (2017) menjelaskan bahwa nilai kemanusiaan dalam Pancasila mengharapkan setiap individu untuk menghormati hak-hak orang lain, menjunjung tinggi keadilan, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Pelanggaran terhadap prinsip ini terlihat jelas dalam kasus Duta Palma, di mana hak masyarakat setempat atas pengelolaan sumber daya alam diabaikan, sementara

kerugian negara yang sangat besar merusak kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Implikasi Kasus

Korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group tidak hanya menyebabkan kerugian negara secara finansial tetapi juga merugikan masyarakat lokal dan lingkungan. Lahan yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat digunakan secara ilegal tanpa memberikan manfaat ekonomi atau sosial yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Rekomendasi Solusi

Penegakan Hukum yang Tegas

Mengingat besarnya skala korupsi, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan transparan untuk memastikan bahwa para pelaku, baik di sektor swasta maupun pemerintah, mendapat hukuman setimpal.

Reformasi Sistem Perizinan

Proses perizinan lahan perlu direformasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Pendidikan Antikorupsi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, program pendidikan antikorupsi harus diterapkan di semua

jenjang pendidikan untuk membangun kesadaran dan budaya antikorupsi di masyarakat.

Peningkatan Kesadaran Nilai Pancasila

Pancasila, khususnya sila kedua, perlu ditekankan sebagai fondasi moral untuk mengatasi korupsi. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, baik oleh individu maupun institusi.

Kasus korupsi PT Duta Palma Group adalah cerminan dari kompleksitas masalah korupsi di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolektif yang melibatkan reformasi hukum, penguatan etika publik, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

B. Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK Untuk Menangani Tindak Kasus Korupsi Surya Darmadi Sesuai Nilai Kemanusiaan

Tindakan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini mulai terlihat jelas pada 1 Agustus 2022, ketika Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perampasan lahan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sejak tahun 2003 hingga 2022, lahan tersebut dikelola tanpa izin oleh perusahaan kelapa sawit Surya, yaitu PT Duta Palma Group. Atas perbuatannya, Surya dikenakan pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 78 triliun.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Surya beberapa kali mengabaikan panggilan dari Jaksa Agung. Sebelumnya, pada tahun 2014, Surya juga sudah menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi terkait alih fungsi hutan di Provinsi

Riau. Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa Surya memberikan suap senilai Rp 3 miliar kepada mantan Gubernur Riau, Annas Mamun, melalui perantara Gulat Medali Emas Manurung.

Pada 15 Agustus 2022, Kejaksaan Agung berhasil menjemput Surya Darmadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penjemputan ini merupakan hasil dari komunikasi antara tim penyidik Kejaksaan Agung dan tim penasihat hukum tersangka. Surya terbang dari Taiwan dengan maskapai China Airlines CI761 pada pukul 09.36 waktu setempat dan tiba di Indonesia pada pukul 13.13 WIB. Setibanya di Kejaksaan Agung, Surya langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan identitas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. (Putri, 2024).

C. Alasan Surya Darmadi Melakukan Tindak Pidana Korupsi Meskipun Melanggar Nilai Kemanusiaan

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi yang ditangani di Indonesia, meningkat 8,63% dari tahun sebelumnya. Sebanyak 1.396 orang telah menjadi tersangka dalam berbagai kasus korupsi. Meningkatnya kasus korupsi ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal.

Dalam kasus pengambilalihan lahan kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group, terdapat beberapa faktor penyebab korupsi di Indonesia yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: perilaku individu, kelemahan hukum dan peraturan, serta ketidakmampuan sistem pengawasan. Dari sisi individu, korupsi sering kali didorong oleh motivasi internal seperti keserakahan, konsumsi berlebihan, rendahnya nilai agama, dan kurangnya etika dalam pelayanan publik.

Surya Darmadi sendiri didorong oleh keserakahan untuk memperluas bisnisnya secara ilegal dengan merampas lahan kelapa sawit di Provinsi Riau. Meskipun dokumen yang dimiliki oleh PT Duta Palma Group tidak sah, Surya tetap membayar sejumlah besar uang kepada

Raja Tamsir Rachman, Bupati Indragiri Hulu, sebagai imbalan atas izin yang diberikan. Selain faktor individu, lemahnya regulasi dan peraturan perundang-undangan juga menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi.

Kelemahan dalam proses perizinan lahan memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Surya Darmadi, untuk mengeksploitasi sistem yang tidak transparan. Ketika peraturan tidak jelas, perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum untuk melakukan aktivitas ilegal, seperti memalsukan dokumen atau menyuap pejabat terkait. Sistem hukum yang lemah semakin memperburuk situasi, karena memberikan peluang bagi pelaku korupsi untuk menghindari tanggung jawab hukum. (Nailuvar et al., 2023, 143)

Kasus ini juga menunjukkan dampak besar dari korupsi terhadap perekonomian dan lingkungan. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 78 triliun, yang mencakup kerugian dari hasil produksi tandan buah kelapa sawit sebesar Rp 9,6 triliun dan kerusakan lingkungan yang mencapai Rp 69,1 triliun. Dampak kerugian ini akan mempengaruhi alokasi anggaran negara dan dapat mengganggu pembangunan di sektor lain.

Akibat dari pengurangan anggaran, sektor-sektor yang krusial bagi masyarakat, seperti pertanian dan industri skala kecil, mungkin mengalami penurunan investasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Korupsi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, sehingga memperburuk situasi ekonomi dan sosial di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Korupsi merupakan persoalan serius di Indonesia yang memberikan dampak luas dan merugikan bagi masyarakat serta negara. Penyebab utama korupsi dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan individu yang terlibat, seperti kurangnya integritas, lemahnya moralitas,

dan keserakahan yang mendorong tindakan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kelemahan dalam struktur sosial dan sistem hukum, termasuk celah dalam pengaturan dan pengawasan yang memberikan ruang bagi praktik korupsi untuk terjadi. Sistem yang tidak efektif sering kali memfasilitasi tindakan korupsi ini, sehingga memperburuk kondisi kelembagaan di berbagai sektor.

Berbagai bentuk korupsi yang umum terjadi di Indonesia mencakup suap, kerugian keuangan negara, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan benturan kepentingan. Dampak dari korupsi meluas hingga menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk pelayanan publik, menciptakan ketimpangan sosial, dan merusak institusi negara. Korupsi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menimbulkan ketegangan sosial yang semakin memperburuk stabilitas masyarakat.

Pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari masalah struktural dan manajerial. Hambatan struktural mencakup kerumitan sistem pemerintahan dan hukum yang tidak efisien, sementara hambatan manajerial berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kewenangan, dan efektivitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Oleh karena itu, langkah-langkah yang sistematis dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

Penegakan hukum yang tegas menjadi langkah pertama yang harus dilakukan, termasuk pemberian sanksi berat bagi pelaku korupsi, seperti pencabutan hak politik, pengumuman putusan melalui media massa, serta peningkatan transparansi dalam proses hukum. Upaya ini harus didukung oleh penguatan transparansi dan pengawasan dalam penggunaan dana publik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, edukasi antikorupsi sangat penting untuk menanamkan kesadaran moral dan nilai-nilai integritas, terutama dengan berbasis pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral bangsa.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat perlu didorong untuk aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi, dengan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor. Di tingkat sistemik, reformasi politik harus dilakukan untuk memastikan bahwa dunia politik terbebas dari praktik korupsi, termasuk melalui pembatasan dana kampanye dan peningkatan transparansi dalam proses politik. Kerja sama internasional juga diperlukan untuk menangani kasus korupsi yang bersifat lintas negara.

Evaluasi kebijakan pencegahan korupsi secara berkala sangat penting untuk menyesuaikan strategi dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan masyarakat, sehingga praktik korupsi dapat diminimalkan di berbagai sektor. Dengan pendekatan yang integratif dan konsisten, Indonesia dapat membangun tata kelola yang lebih bersih, transparan, dan adil, serta memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi negara.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah. (2011). Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Sikap Tanggungjawab dan Kemampuan Berpikir Kritis di Kelas V SD Negeri 02 Pliken. <https://www.scribd.com/document/631582956/AISYAH-BAB-II>
- Alatas, S. H. (1987). Korupsi: sifat, sebab dan fungsi. LP3ES-Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan sosial.
- Bianome, B. C. F., Nitte, Y., Enstein, J., Hendrik, G. N., Ndiy, I. M., Tasuib, M., Haring7, M. S., Mogi, T. N., & Bessie, A. P. (2024). Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan. EDUKASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN WORDWALL B, Volume 4 Nomor 1(Januari 2024), 80. <https://ojs.cbn.ac.id/index.php/pemimpin/article/view/1216>
- Ernest, Y. (2023, Februari 23). Emosi Surya Darmadi Meledak Jelang Sidang Vonis Kasus Korupsi Rp 86 T Baca artikel detiknews, "Emosi Surya Darmadi Meledak Jelang Sidang Vonis Kasus Korupsi Rp 86 T" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6584371/emosi-surya-darmadi-meledak-jelang-s>. Emosi Surya Darmadi Meledak Jelang Sidang Vonis Kasus Korupsi Rp 86 T. <https://news.detik.com/berita/d-6584371/emosi-surya-darmadi-meledak-jelang-sidang-vonis-kasus-korupsi-rp-86-t>
- Faddilah, S. N. (2018, Oktober 13). <http://academia.edu/>. Makalah Sila 2 UNISA. https://www.academia.edu/38229330/MAKALAH_SILA_2_UNISA_docx
- Hartanti, E. (2006). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Hasoloan, R. J., Larasati, M. G. D., Yusuf, F. E., Imantria, D. B., & Sulistyawati, N. (2022). Journal of Creativity Student. The Spirit of

the Anti-Corruption Movement in the Campus Environment Through Various Community Creativity Social Media Movements, Volume 7 Nomor 2, 290.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/jcs/article/view/38207/14124>

Lisdiana, & Saputro, I. H. (2014). PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. DPP IKA Universitas Negeri Semarang.
<http://bit.ly/2o5tvm0>

Mispansyah, M., & Nurunnisa, N. (2021). Jurnal Ius Constituendum. PENYALAHGUNAAN PERIZINAN PERKEBUNAN SAWIT DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI, Volume 6 Nomor 2, 349.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2700/2167>

Nailuvar, D. Q., Lubis, G. D., Azahra, N., & Prasetyo, R. R. N. A. P. (2023, Desember 8). Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. Kedudukan dan Peran KPK dalam Penanganan Kasus Korupsi Penyerobotan Lahan Negara untuk Kelapa Sawit di Riau oleh Grup Duta Palma, Volume 1 Nomor 2, 143.
<https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.291>

Nurwardani, P. (2016). Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi: Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila (1st ed.). Indonesia Prime.
https://www.academia.edu/45421505/Pendidikan_Pancasila_untuk_Perguruan_Tinggi_Ristekdikti_2016_

Pawiroputro. (2011). Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kementerian Pendidikan Nasional.

Pusat Edukasi Anti-Korupsi. (2022, April 7). Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya! Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya! Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya!

- Puspadini, M. (2023, Desember 31). Sosok Surya Darmadi, Bos Sawit yang Bikin Rugi Negara Rp100 T. Sosok Surya Darmadi, Bos Sawit yang Bikin Rugi Negara Rp100 T. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231229173143-17-501389/sosok-surya-darmadi-bos-sawit-yang-bikin-rugi-negara-rp100-t>
- Putri, R. S. (2024, January 28). Sosok Pengusaha Sawit Ini Bikin Negara Rugi Rp100 Triliun. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240128152148-17-509611/sosok-pengusaha-sawit-ini-bikin-negara-rugi-rp100-triliun>
- Rahman, A. (2018, Januari 31). SYNTAX LITERATE. NILAI PANCasila KONDISI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MASYARAKAT GLOBAL, Volume 3 Nomor 1. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/301/416>
- Sejati, P. N., & Prasetyo, H. (2023). Rechtidee. UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI PENYALAHGUNAAN ALIH FUNGSI HUTAN, 8(2), 57. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/22015/pdf>
- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018, November). Jurnal Hukum Respublica. Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum, Volume 18 Nomor 1. <https://doi.org/10.31849/respublica.v18i1.3947>
- Wibowo, A. (2013). Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah (Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah). Pustaka Pelajar. <https://www.scribd.com/document/325926299/Pendidikan-Antikorupsi-Di-Sekolah>
- Teguh, S., & Aria, Z. (2011). Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm 63

- Firman, F., & Asih W. L. (2016). Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventi Reformasi, 6, no.1. Hlm 87
- Mardjono R. (1997). Kriminology Dan Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Universitas Indonesia). Hlm 3
- Kuswan H. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Norma Dalam , 2018 Mencegah Korupsi di Indonesia, Literasi Hukum 2, no. 1. Hlm 4
- Abdullah T. Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengelemenasi Kejahatan Korupsi Hlm 50-55
- Firman F. B. (2017) Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Jurnal Lex Publicia, IV, no. 1, Hlm 636
- Arief, Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana). Hlm 33
- Yamin, M. (2016). Pendidikan anti korupsi. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Yudhanegara, H. F. (2015). Cendekia. Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme, Volume 8 Nomor 2. <https://www.jurnal.unma.ac.id/index.php/JC/article/view/153/131>.